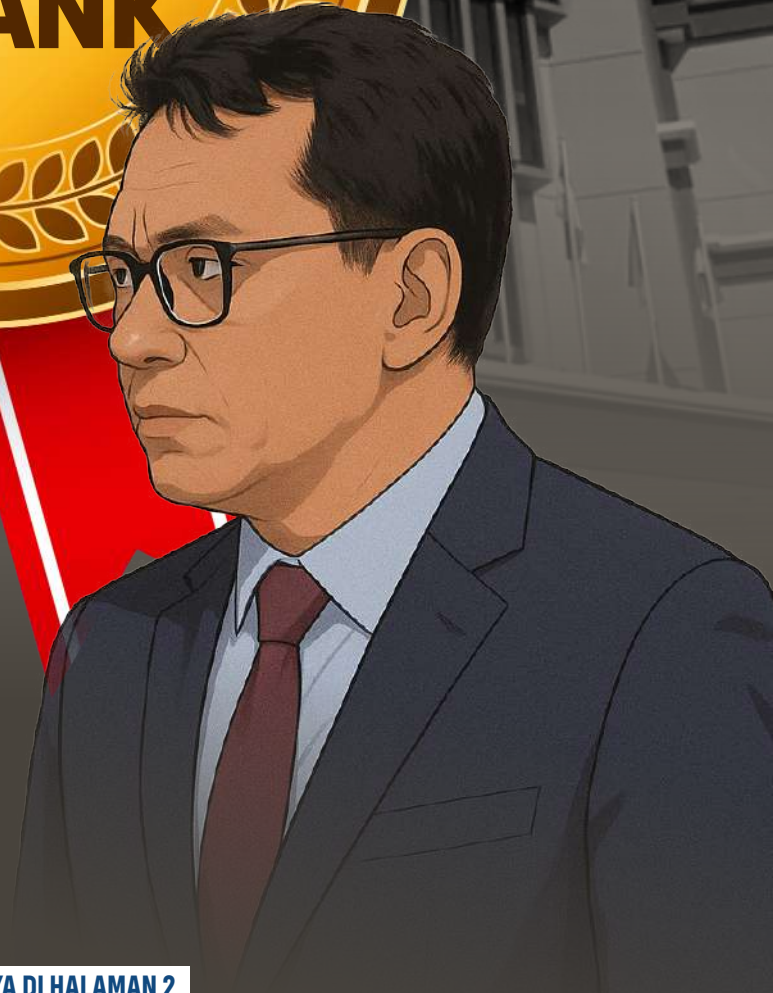




PRESTASI BERAU MASUK 10 BESAR



BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 2



SRI JUNIARSIH
BUPATI BERAU

PURBAYA YUDHI SADEWA
MENTERI KEUANGAN INDONESIA

TITO KARNAVIAN
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Pantas Ekonomi Lambat Anggaran Banyak Mengendap

ANGGARAN Pemerintah Daerah mendadak menjadi sorotan nasional dalam beberapa bulan terakhir. Usai adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), Kementerian Keuangan kini menyoroti besarnya simpanan anggaran pemda di perbankan.

Saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan data inflasi daerah, serapan anggaran, hingga data simpanan bank.

Tito sempat menunjukkan slide presentasi soal 10 kabupaten dan 10 kota di Indonesia yang memiliki simpanan di bank terbesar. Data yang ditampilkan tersebut merupakan data dari Bank Indonesia yang diolah oleh Kemendagri.

Dari data tersebut, Bojonegoro menjadi kabupaten dengan simpanan terbesar di bank mencapai Rp3,6 triliun. Setelah itu berturut-turut Kutai Barat (Rp3,2 triliun), Talaud (Rp2,6 triliun), Mimika (Rp2,4 triliun), Badung (Rp2,2 triliun), Tanah Bumbu (Rp2,1 triliun), Balangan (Rp1,86 triliun), Tabalong (Rp1,82 triliun), Kutai Timur (Rp1,7 triliun), dan Berau (Rp1,6 triliun).

Menkeu Purbaya menyebut masih banyak pemda yang belum meningkatkan serapan anggaran dalam APBD 2025. Dia mengatakan realisasi APBD baru mencapai angka 51,3 persen dari pagu anggaran Rp1.389 triliun. Artinya, anggaran pemda

yang dibelanjakan baru mencapai sekitar Rp712,8 triliun.

Tak hanya itu, Purbaya juga menyoroti bengkaknya simpanan Pemda di bank yang mencapai Rp234 triliun, sehingga serapan anggaran berjalan lambat.

"Ini bukan soal uangnya tidak ada, tetapi soal kecepatan eksekusi, yang saya khawatirkan itu, belanja produktif seperti belanja modal malah turun lebih dari 31 persen. Padahal itu yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, seharusnya Pemda tidak menyimpan uang di perbankan nasional di Jakarta, melainkan di BPD yang ada di masing-masing daerah. Sehingga, likuiditas di tiap daerah masih bisa terjaga.

"Kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh. Businessman dari daerah enggak bisa dapat pinjaman," ujarnya.

Purbaya menegaskan pemerintah sudah menyalurkan transfer ke daerah hingga Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu nasional. Dana itu kini menunggu digunakan untuk program pembangunan yang produktif.

"Uangnya sudah ada, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan segera untuk belanja yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, dana yang dimaksud bukanlah dana nganggur atau simpanan deposito yang tidak digunakan.

"Sebenarnya itu bukan simpanan dalam jangka waktu lama. Ini kan sedang berlangsung kegiatan-kegiatan proyek ya. Jadi itu kita simpan sementara karena tidak mungkin kita membayar di depan," jelasnya.

Menurut Sri Juniarsih, dana tersebut merupakan anggaran yang sedang diparkir sementara untuk membayar proyek-proyek fisik yang tengah berjalan di berbagai sektor.

Menyimpan uang di bank, kata dia, merupakan prosedur standar dalam pengelolaan keuangan daerah agar dana tetap aman sebelum dibayarkan kepada pihak ketiga atau kontraktor sesuai progres pekerjaan di lapangan.

"Jadi kita tidak deposit, kita hanya mengamankan uang supaya tidak bermasalah. Kan tidak mungkin kita pegang cash. Jadi kita simpan dulu di bank tertentu, ketika pekerjaan selesai, kita bayar," terangnya.

Dia menambahkan, Pemkab Berau bekerja sama dengan sejumlah bank, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), untuk mendukung kelancaran transaksi dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

"Seluruh bank tempat kami menyimpan dana itu memang untuk pembayaran kegiatan yang sedang berlangsung. Bukan untuk lama-lama, hanya untuk mengamankan anggaran," tegasnya. (FAWDI/DINI DIVA APRILIA)

PELAYANAN RUMAH SAKIT HARUSNYA SEMAKIN BAIK

PELAYANAN kesehatan di RSUD dr Abdul Rivai memang terus disorot dalam beberapa bulan terakhir. DPRD Berau yang biasa mengkritik lewat suara pun akhirnya turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit pelat merah itu.

Pada 21 Oktober 2025, Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, bersama sejumlah anggota dewan melakukan sidak untuk meninjau langsung kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan, termasuk layanan BPJS, fasilitas ruang ICU, serta unit hemodialisa (cuci darah).

Elita mengungkapkan, salah satu perhatian utama DPRD adalah layanan BPJS Kesehatan yang sempat mengalami penurunan atau penyesuaian. Sehingga, pihaknya ingin memastikan batas wak-



tu penyesuaian yang di-deadline sampai Desember 2025.

Untungnya, dari hasil diskusi dengan pihak rumah sakit milik Pemkab Berau itu, pelayanan BPJS akan kembali normal mulai November.

Selain persoalan BPJS, Komisi I juga menyoroti keterbatasan fasilitas pada ruangan hemodialisa. Menurut Elita, masih ada sekitar 4-5 unit alat cuci darah yang belum bisa difungsikan karena keterbatasan ruangan. Padahal, pasien hemodialisa di Berau jumlahnya cukup banyak, yakni sekitar 200-an orang.

"Kami berharap kapasitas ruangan bisa segera diperluas agar semua alat yang ada bisa digunakan maksimal," terangnya.

Komisi I juga meninjau ruangan ICU dan ruang EDW (Edelweiss) yang baru saja dioptimalkan.

"Dulu ruang ICU belum terpenuhi, tapi sekarang sudah dilengkapi delapan tempat tidur. Ini kemajuan yang baik dan kami apresiasi kerja cepat dari manajemen rumah sakit," tambahnya.

Komisi I juga mendorong agar kerja sama lintas sektor antara RSUD, Dinas Kesehatan, dan DPRD terus diperkuat demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

"Pelayanan kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, tapi juga dinas dan DPRD. Semua harus berkolaborasi agar masyarakat mendapat layanan yang layak," tegas Elita.

Plt Direktur RSUD Abdul Rivai, Arif Rudi Hermawan, menyambut baik kedatangan rombongan dari Komisi I DPRD Berau.

"Dari diskusi kami memang ada beberapa penyampaian dan itu akan ditindaklanjuti. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS untuk membahas solusi bersama," ujarnya.

Menurutnya, beberapa kebutuhan teknis yang disorot dewan, seperti perbaikan fasilitas dan kelengkapan ruangan, sudah dalam proses penyelesaian.

"Kami akan rapat bersama lagi dengan Komisi I untuk menindaklanjuti hasil sidak ini," ujarnya. **(HENDRA IRAWAN)**





TAK ADA SOLUSI LAWAN SERANGAN BUAYA

KASUS serangan buaya kepada manusia kembali terjadi di Kabupaten Berau. Insiden yang terus berulang ini sampai sekarang juga belum ada solusi karena terganjal rumitnya regulasi.

Terbaru, pada 18 Oktober 2025, seorang pria bernama Wahyudin (32) tewas akibat diserang buaya saat melakukan aktivitas di perairan RT 01 Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Bidukbiduk.

Menurut keterangan rekan korban, Fardiensyah, serangan buaya tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WITA saat keduanya tengah menyelam untuk memamah ikan.

Fardiensyah menjelaskan, pada Minggu (19/10/2025) tersebut, dirinya menyelam hingga kedalaman tiga meter. Sementara, Wahyudin menyelam hingga dasar di kedalaman 10 meter.

Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Fardiensyah melihat Wahyudin diserang seekor Buaya. Terlihat tangan kiri korban sudah digigit oleh buaya tersebut, namun masih berusaha melakukan perlawanan.

Fardiensyah sendiri tidak dapat membantu korban karena jaraknya sekitar 30 meter.

Kemudian, dia pergi ke tepi pantai untuk meminta pertolongan. Lalu, dia bersama orang tua korban dan dibantu warga setempat berusaha menyelamatkan korban yang saat itu sudah dalam keadaan tenggelam yang ditarik oleh buaya tersebut.

Setelah ditemukan warga, korban sudah dalam keadaan lemas dan tak sadarkan diri, namun buaya tersebut masih menggigit tangannya. Salah satu warga kemudian memukul buaya tersebut hingga melepaskan gigitannya dari tangan korban.

Jenazah Wahyudin kemudian dievakuasi ke daratan dan diserahkan kepada



pihak keluarga.

Atas kejadian tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di perairan yang diketahui menjadi habitat predator tersebut.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Nofian Hidayat, mengatakan, pihaknya turut prihatin atas kejadian tersebut. Namun, untuk saat ini, langkah yang bisa dilakukan BPBD masih terbatas pada imbauan dan pengawasan di lapangan.

"Bukan berarti kami abai terhadap keselamatan masyarakat. Tapi secara regulasi, penanganan buaya sekarang sudah menjadi kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Timur," ungkap Nofian, Senin (20/10/2025).

Menurut Nofian, sebelumnya penanganan satwa liar seperti buaya berada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Namun, kini kewenangan tersebut telah dialihkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tim dari dinas tersebut yang ditempatkan di Berau.

"Kalau dulu BKSDA yang turun langsung. Sekarang sudah beralih ke Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi, kami di BPBD tidak bisa berbuat banyak karena terbentur aturan," ujarnya.

Selain

regulasi, kendala lainnya adalah belum adanya tempat penangkaran buaya yang difasilitasi pemerintah provinsi. Sementara, satu-satunya lokasi penangkaran terdekat berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

"Kalau mau dievakuasi atau dipindahkan, harus dikirim ke Tarakan. Tapi itu butuh biaya, sementara kami tidak punya pos anggaran untuk itu," paparnya.

Sebagai solusi, Nofian menyarankan Pemprov Kaltim menempatkan ranger khusus di wilayah-wilayah rawan konflik manusia dan buaya, termasuk membangun pusat penangkaran yang dikelola pemerintah provinsi.

"Kalau itu bisa dilakukan, kami tentu siap berkolaborasi. BPBD siap membantu dari sisi dukungan lapangan, tapi untuk aksi langsung penanganan buaya bukan kewenangan kami," tegasnya.

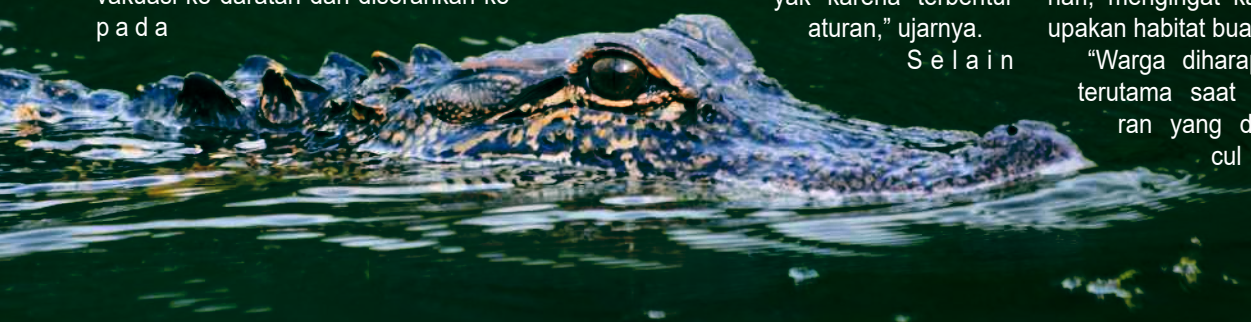
Dia pun kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama saat beraktivitas di sungai atau muara yang menjadi habitat buaya.

"Lebih baik waspada dan menjaga jarak aman, karena serangan bisa terjadi kapan saja," ujarnya.

Kasi Humas Polres Berau, AKP Ngatijan, juga mengimbau warga pesisir, khususnya di wilayah Bidukbiduk, agar lebih berhati-hati dan menghindari aktivitas menyelam atau memancing di malam hari, mengingat kawasan tersebut merupakan habitat buaya liar.

"Warga diharapkan tetap waspada, terutama saat beraktivitas di perairan yang diketahui sering muncul buaya," pungkasnya.

(HENDRAIRAWAN)



Perjuangan

MELANNY WIDJAJA

Lawan Stigma ODGJ di Berau

DI balik pintu bertuliskan Ruang Tulip di RSUD dr Abdul Rivai, Tanjung Redeb, Berau, seorang perempuan dengan langkah tenang tampak akrab menyapa pasien-pasien dengan gangguan jiwa.

Dia adalah dr. Melanny Widjaja, satu-satunya dokter spesialis jiwa yang bertugas di Berau sejak tahun 2011.

Selama 14 tahun mengabdikan, dr. Melanny Widjaja menjadi tumpuan bagi banyak keluarga yang berjuang mendampingi anggota mereka yang mengalami gangguan jiwa.

Sebelum bertugas di Berau, ia sempat menjadi dokter jaga IGD RSAL Jala Amari, kemudian psikiater di RSJ Mataram, dan psikiater di RSUD Bulungan.

Pendidikan formalnya meliputi dokter spesialis kedokteran jiwa (Sp.KJ) dan Magister Kesehatan (M.Kes), ditambah pelatihan nonformal seperti English Course dan Mandarin Language Course. Kini, ia aktif sebagai psikiater di RSUD dr Abdul Rivai Berau hingga saat ini.

Lulusan Universitas Hasanuddin Makassar ini mengaku awalnya memilih spesialis kedokteran jiwa karena alasan sederhana.

"Waktu kuliah saya pikir, ah biar gak jaga malam. Tapi makin dijalani, saya merasa ini menarik. Bisa membantu orang menemukan ketenangan, rasanya luar biasa," katanya.

Dukungan penuh dari keluarga membuat dr. Melanny teguh perannya sebagai psikiater tunggal di Berau. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, ia tetap berpegang pada satu prinsip sederhana.

"Saya hanya ingin mereka dipahami. Gangguan jiwa bukan kutukan, tapi kondisi yang bisa ditangani. Selama ada empati,

mereka tetap bisa hidup dengan martabat."

Tak hanya di rumah sakit, ia juga kerap turun langsung ke kampung di Berau bersama tim Dinkes Berau untuk menemui pasien yang tidak pernah terdata atau bahkan masih dipasung.

"Kita menyasar yang tidak pernah dilaporkan ke Puskesmas. Ada yang dirantai di teras rumah, ada juga yang dikurung di ruangan terbuka. Pernah pasien perempuan dipasung di pinggir jalan, akhirnya malah dilecehkan," ungkapnya.

Menurutnya, penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ harus dimulai dengan deteksi dini.

Jika masih bisa dikendalikan, pasien akan diberikan psikoterapi dan psikofarmaka. Namun bila sudah membahayakan diri sendiri atau orang lain, mereka akan dirawat di Ruang Tulip.

Dia mengatakan, tantangan terbesar dalam menangani ODGJ adalah kepatuhan berobat. Banyak pasien yang berhenti minum obat karena merasa sudah sembuh, padahal penyakitnya bersifat kronis dan berpotensi kambuh.

"Kepatuhan itu yang paling berat. Obat-obatan psikotropika harganya mahal, dan tidak semua tersedia di puskesmas. Kadang juga terkendala aturan BPJS dan ketersediaan obat di kampung-kampung," jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pasien skizofrenia pun tetap bisa produktif bila rutin berobat.

"Kata sembuh total memang tidak ada, tapi dengan pengobatan teratur mereka bisa hidup normal dan bekerja," ujarnya.

Lebih jauh, dirinya mencatat adanya peningkatan jumlah pasien ODGJ di Be-



rau. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari ekonomi, konflik rumah tangga, KDRT, hingga pelecehan seksual.

"Belakangan juga muncul kasus karena tekanan identitas seksual. Kita di Indonesia masih sulit menerima hal-hal seperti LGBT, dan itu bisa menjadi stressor berat bagi mereka," ungkapnya.

Ia menilai, meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi juga membuat banyak orang tak menyadari bahwa mereka sedang mengalami gangguan mental.

"Banyak yang datang sudah dalam kondisi berat. Padahal kalau ditangani sejak awal, tidak sampai harus dirawat," tambahnya.

Menurutnya, kesembuhan pasien sangat bergantung pada peran keluarga dan lingkungan sekitar. Karena itu, edukasi selalu ia tekankan kepada pendamping pasien.

"Kalau keluarganya tidak bisa bekerja sama, sulit untuk sembuh. Mereka yang paling berperan mengingatkan pasien minum obat dan datang kontrol," ujarnya.

Menjadi psikiater berarti harus mampu memahami perasaan pasien, namun tetap menjaga batas profesional.

"Kita harus berempati, tapi tidak boleh ikut larut. Kalau pasien menangis, kita tidak boleh ikut menangis. Hubungan dokter-pasien harus tetap profesional," tegasnya.

Ditanya apakah psikiater juga butuh tempat curhat, ia tersenyum. "Ya tentu. Tapi kami mempraktikkan apa yang kami ajarkan refleksi diri, menjaga pikiran tetap sehat. Kalau dokter mentalnya tidak sehat, bagaimana mau bantu orang lain?"

(DINI DIVA APRILIA)





Gabah Lokal Diserap Bulog, Rp 6 Miliar Mengalir ke Pertanian Berau

PERUM Bulog Berau terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sepanjang tahun ini, Bulog Berau telah menyerap 900 ton gabah dari petani lokal dengan total transaksi mencapai sekitar Rp6 miliar langsung mengalir ke rekening petani.



LUCKY ALI AKBAR

Kepala Perum Bulog Berau, Lucky Ali Akbar, menjelaskan bahwa serapan gabah tersebut menjadi langkah nyata dalam menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan.

“Dari 900 ton itu, sekitar enam miliar rupiah kita hantarkan langsung ke petani. Artinya, petani punya daya beli, dan jika daya beli meningkat, roda ekonomi di tingkat bawah juga ikut berputar,” ungkapnya.

Selain itu, Bulog juga mendukung penggilingan-penggilingan kecil di wilayah Berau, yang turut merasakan dampak positif dari kegiatan serapan ini.

“Kerja sama dengan penggilingan kecil saja, ada sekitar Rp1,5 miliar yang berputar. Ini lumayan besar dan kami harapkan bisa berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di Kabupaten Berau,” lanjutnya.

Terkait mekanisme pembelian, ia menegaskan bahwa Bulog tidak mensyaratkan petani harus tergabung dalam

kelompok. Pembelian dilakukan langsung kepada petani perorangan, sehingga hasil panen dapat segera diterima tanpa perantara.

“Rekeningnya langsung masuk ke petani. Kami berharap perbankan juga bisa masuk untuk memberikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar petani punya modal dan tidak bergantung pada tengkulak,” jelasnya.

Untuk menjaga kualitas, Bulog mengikuti standar nasional. Gabah yang diserap merupakan gabah kering panen dengan kadar air 25–28 persen, yang kemudian diolah menjadi gabah kering giling dengan kadar air maksimal 14 persen. Harga pembelian ditetapkan secara nasional, yakni Rp6.500 per kilogram.

“Setelah diserap, gabah ini akan menjadi bagian dari cadangan pangan pemerintah, yang nantinya digunakan untuk berbagai program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” tutup Lucky. (DINI DIVA APRILIA)



Anggaran Porprov Jauh dari Harapan

PEKAN Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Paser tinggal menghitung bulan. Semangat atlet dan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Berau pun mulai memanas.

Satu per satu cabang kini menggelar Babak Kualifikasi (BK) sebagai langkah awal menuju Porprov Kaltim 2026. Namun, dibalik semangat itu, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama soal anggaran.

Ketua KONI Berau, Taupan Madjid, mengatakan beberapa cabang sudah mulai beraksi lebih dulu menyesuaikan jadwal dari provinsi.

"Cabang seperti atletik sudah melaksanakan BK di Kutai Kartanegara, termasuk panjat tebing dan beberapa lainnya," kata Taupan, Rabu (22/10/2025).

Menurut Taupan, idealnya seluruh tahapan kualifikasi selesai dalam dua bulan terakhir agar atlet punya waktu cukup untuk berlatih dan memperbaiki strategi. Namun, jadwal yang ditentukan pengurus provinsi membuat beberapa cabang masih harus menunggu giliran.

"Seharusnya tahapan BK sudah rampung sekarang, tapi karena jadwal berbeda-beda di tiap provinsi, beberapa masih berjalan," jelasnya.

Meski prosesnya tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Timur, KONI Berau memastikan tetap mendampingi para atlet dan pelatih di setiap tahapan.

Taupan menyebut, komunikasi intensif dengan pengurus provinsi menjadi kunci agar tidak ada hambatan berarti di lapangan.

"Kami terus berkoordinasi agar semua berjalan sesuai rencana. Dukungan teknis maupun non-teknis harus terus dijaga," tegasnya.

Di balik semangat besar itu, KONI Berau juga menghadapi kenyataan pahit, yakni anggaran yang jauh dari harapan. Dari total pengajuan sebesar Rp7 miliar untuk mendukung seluruh kegiatan BK dan persiapan Porprov, hanya Rp3 miliar yang disetujui pemerintah daerah.

"Yang kami ajukan Rp7 miliar, tapi realisasinya hanya Rp3 miliar," ungkap Taupan.

Meski begitu, semangat tidak boleh padam. Ia menegaskan, keterbatasan dana bukan alasan untuk mengendurkan upaya pembinaan atlet.

"Kami harus efisien di semua lini. Yang penting, atlet tetap bisa berlatih dan bersaing dengan baik," ujarnya.

Taupan berharap pemerintah daerah bisa memberi perhatian lebih terhadap dunia olahraga. Pasalnya, Porprov bukan hanya tentang medali, melainkan juga kebanggaan dan identitas daerah.

"Kami ingin atlet Berau tampil maksimal. Ini momentum menunjukkan potensi kita di level provinsi," katanya.

Ia pun mengingatkan seluruh pengurus cabang agar tak menunggu waktu terlalu lama. Persiapan harus dimulai sejak dini karena Porprov 2026 tinggal menghitung bulan.

"Waktu persiapan tidak banyak. Kami dorong semua cabang untuk serius dari sekarang," tegasnya.

Di sisi lain, Dinas Pemuda dan Olahraga Berau sudah mengalokasikan Rp3 Miliar untuk Pra Porprov Kaltim yang di-

gelar tahun ini.

Menurut Sekretaris Dispora Berau, Kesuma Sirajuddin, anggaran tersebut dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan dalam proses pencairan.

"Kalau anggaran sudah ada. Ini tinggal proses saja. Karena di dewan kan belum disahkan," jelasnya, Rabu (15/10/2025).

Terkait beberapa cabang olahraga yang sudah lebih dulu mengikuti Pra Porprov, Dispora tidak berdiam diri. Pihaknya tetap membantu sesuai dengan kemampuan anggaran.

Dia mengatakan, untuk anggaran Pra Porprov umumnya dilakukan pada ABT. Hal ini tidak hanya berlaku pada Berau, tapi mayoritas daerah lain di Kaltim juga melakukan hal yang sama.

"Karena memang waktu pelaksanaan Pra Porprov di akhir tahun," terangnya.

Sementara, anggaran Porprov 2026, saat ini yang sudah disiapkan baru Rp3 miliar. Namun, besar kemungkinan, anggaran tersebut akan ditambah.

Kendati begitu, pihaknya masih menunggu jumlah pasti berapa total jumlah cabang yang akan ditandingkan di Kabupaten Paser. Sebab, dari total 63 cabang yang ada, belum diputuskan apakah akan ditandingkan secara keseluruhan.

"Kaltim itu ada 10 kabupaten/kota, sementara syarat ditandingkannya cabang tersebut minimal 6 peserta daerah. Jika tidak sampai 6 peserta, maka cabang itu batal ditandingkan. Kami juga tunggu penetapan jumlah cabang yang akan ditandingkan di Porprov nanti," pungkasnya.

(HENDRA IRAWAN)



Olahraga Tradisional JADI DAYA TARIK WISATA BERAU

WABUP Berau Gamalis, menilai olahraga tradisional tidak hanya berperan penting dalam menjaga kebugaran masyarakat, tetapi juga memiliki potensi menjadi daya tarik wisata budaya di daerah.

Menurutnya, olahraga tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan.

Namun, tantangannya tidak mudah mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya minat masyarakat, terutama anak muda, terhadap permainan online.

“Olahraga tradisional ini tidak sekadar permainan, tapi juga sarana kebugaran dan pelestarian budaya kita. Tantangannya sekarang bagaimana membuat generasi muda tetap tertarik, di tengah derasnya arus teknologi dan game online,” ujar Gamalis.

Dia berharap Dispora Berau dapat melakukan pembinaan berke-

lanjutan serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk guru-guru olahraga di sekolah, untuk memperkenalkan dan mengajarkan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini.

Selain itu, Gamalis juga mendorong agar ke depan dapat dilaksanakan Pekan Olahraga Tradisional Kabupaten (PORTRAKAB) sebagai ajang pelestarian sekaligus peningkatan prestasi daerah di cabang olahraga tradisional.

“Kegiatan seperti PORTRAKAB sangat baik untuk menjaga semangat pelestarian budaya, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas dan sportivitas,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan olahraga tradisional di Berau tidak hanya tetap lestari, tetapi juga dapat berkembang menjadi salah satu daya tarik wisata budaya yang membanggakan daerah. **(DINI DIVA APRILIA)**



Berau Terkini
tak berhenti

DIREKSI

Komisaris : M. Syaifuddin Zuhrie
Direktur : Rengkuh Enggalingtyaz, **Digital Marketing Manager** : Aidil Anugrah, **Iklan** : Siti Nur Ariska, **Admin** : Tariska Ramadayani

Advokat & Konsultan Hukum : Firma Hukum H.A.M & Partner

Email Redaksi : berauterkini2023@gmail.com, **Iklan dan informasi** : berauterkini2023@gmail.com
Alamat Redaksi : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, **Telepon** : 0851-6366-0045

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi : Robithoh Johan Palupi,
Koordinator Liputan : Rusdiyono, **Editor** : Maulana Ilhami Fawdi, **Reporter** : Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Nadya Zahira, **Grasis** : Surya Adji Permana,
Media Sosial : Siti Nur Ariska, **IT & Web Development** : Fathurrohman.